EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) KABUPATEN EMPAT LAWANG

Skripsi Oleh:

DESTY ISNIATY
01111003070
Akuntansi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI

2015

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Desty Isniaty
NIM : 01111003070
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Pengauditan Manajemen
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul: Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Empat Lawang

Pembimbing :
Ketua : Drs. Burhanuddin, M. Acc, Ak, CA
Anggota : Yulia Saftiana, S.E, M.Si, Ak
Tanggal Ujian : 11 Juli 2015

Adalah benar hasil karya Saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.
Demikianlah pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan Saya ini tidak benar dikemudian hari, Saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Inderalaya, 11 Juli 2015
Pembuat Penyataan,

Desty Isniaty
NIM 01111003070

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **"**Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Empat Lawang". Penulis menyadari bahwa selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Namun Kesalahan dan berbagai kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Badia Perizade, MBA selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwajaya.
3. Bapak Drs. Burhanuddin, M. Acc, Ak, CA., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Yulia Saftiana, S.E, M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing II yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dan kritik dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Luk Luk Fuadah, SE, MBA, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Relasari, SE, M.Si, Ak, CA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Ahmad Subeki, SE, MM, AK, CA, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan nasehat dalam mengikuti

perkuliahan. Untuk seluruh dosen Fakultas Ekonomi, terima kasih atas ilmu-ilmu yang telah diberikan selama ini. Semoga bermanfaat di kemudian hari.

7. Staff dan Pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
8. Pimpinan dan Pegawai Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Empat Lawang.
9. Kedua Orangtuaku tercinta, Muhammad Daud,SE,M.Si dan Suryani,S.Pd, dua orang yang berperan penting dan paling berpengaruh dalam hidup saya yang selalu memberikan doa restu, kasih sayang, motivasi, kesabaran, dan dukungan moral serta dukungan finansial selama ini. Semoga dengan gelar baru ini, saya bisa mewujudkan keinginan dan impian terbesar saya untuk membahagiakan ayah dan ibu.
10. Saudara tercinta, Delvi Sintia Reni,S.Kg dan Muhammad Rifki, terima kasih atas segala kasih sayang, dukungan, pengalaman berharga, semangat, motivasi, canda tawa, nasehat, waktu, bantuan doa-doa untuk kesuksesan dan keberhasilan saya selama ini. Terimakasih juga sepupu terbaik, Muhammad Adenan, atas dukungan dan waktunya yang selalu ada saat saya butuh kapanpun dan dimanapun.
11. *My Four Favorite Personality*, Sherly Dwi Putri, Apria Sari, Jesi Mei Pradipta dan Siska Aprilia, Terimakasih atas kebaikan kalian, motivator terbaik, terimakasih atas cerita, suka duka bersama, canda tawa, nasehat dan dukungannya, tetaplah menjadi saudari tak sedarahku yang luar biasa sampai kapanpun.
12. Sahabat tersayang, M.Eko Prastia, An Nisaa Ridviania, Gita Mentari, Mutiara, Pipin Kesuma, Wenny Wulandari, Marisa Oktaviani terima kasih atas segala

dukungan, semangat, nasehat-nasehat, dan tempat berbagi keceriaan serta keluh kesah selama ini. Semoga persahabatan kita terus terjalin sampai kapanpun.

13. Sahabat Seperjuanganku tersayang, Ronika Permatasari, Ani Rizky Apsary, Gita Karinanda, Asti Triana, Jannati Fitri, Aditya Jaya, Alan Nuary, Dimas Hardiansyah, Dimas Kesumajaya, Verliansyah Pratama dan M.Firanata terima kasih atas kebersamaannya selama ini, bantuan, dukungan, semangat dan pengalaman berharga, cerita dan perjuangan luar biasa kita beberapa tahun ini takkan terlupakan. Semoga kita nantinya dipertemukan dengan kesuksesan masing-masing.
14. Teman terbaikku dari SMA, Mega Chintya, Eka Wahyuni dan Liza purnama, terimakasih atas cerita, dukungan, bantuan, semangat dan kebersamaannya selama ini.
15. Teman-teman Akuntansi 2011 yang memberikan kebersamaan selama perkuliahan dan bantuannya selama ini. Sukses untuk kita semua, Aamiin..

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkannya dan semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala amal kebaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan laporan skripsi ini, Aamiin Yarobbal'alamin.

Indralaya, Juli 2015

Penulis

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul "Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Empat Lawang". Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Empat Lawang serta menilai apakah penerapannya sudah berjalan secara efektif atau belum.

Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini bisa memberikan manfaat kepada akademisi dan masyarakat umum terutama bagi pihak Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Empat Lawang agar bisa menjadi bahan masukan dan pertimbangan yang berguna di masa mendatang.

Terima Kasih,
Inderalaya, 13 Juli 2015

Penulis

ABSTRACT

The efectivity of internal control system of government at Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) office Kabupaten Empat Lawang

By:
Desty Isniaty
Drs. Burhanuddin, M.Acc, Ak, CA
Yulia Saftiana, S.E, M.Si, Ak

This research aimed to evaluate the efectivity of internal control system of government at Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) office Kabupaten Empat Lawang. This research used qualitative data by collecting primer data from interview and secondary data from library research and documentation. The result of this study showed that internal control system of government at Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) office Kabupaten Empat Lawang has implemented efectively because every element of internal control system of government such as control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and overall monitoring has well implemented.

Keywords: internal control system of government, efectivity, element of internal control system

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) KABUPATEN EMPAT LAWANG

Oleh :
Desty Isniaty

Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan sistem pengendalian internal pemerintah pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Empat Lawang. Penelitian ini menggunakan data kualitatif, dimana metode pengumpulan datanya adalah dengan menggunakan data primer yang didapatkan melalui wawancara serta menggunakan data sekunder dari riset kepustakaan dan dokumentasi. Dari hasil analisis dan pembahasan yang penulis lakukan, diketahui bahwa sistem pengendalian internal pemerintah pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Empat Lawang sudah dilaksanakan secara efektif karena setiap unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yaitu, lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan secara keseluruhan sudah dijalankan dengan baik.

Kata Kunci: sistem pengendalian internal pemerintah, efektivitas, unsur-unsur sistem pengendalian internal.

RIWAYAT HIDUP

Nama Mahasiswa	**:** Desty Isniaty
Jenis Kelamin	**:** Perempuan
Tempat/ Tanggal Lahir	**:** Lahat/ 18 Desember 1993
Agama	**:** Islam
Status	**:** Belum Menikah
Alamat Rumah (Orang Tua)	**:** Jl. Lahangan no.70 Blok C Bandar Jaya Kabupaten Lahat
Alamat Email	**:** Destyjetek@gmail.com
Pendidikan Formal:	
Taman Kanak-Kanak	**:** TK Pertiwi Lahat
Sekolah Dasar	**:** SD N 19 Lahat
SMP	**:** SMP N 5 Lahat
SMA	**:** SMA N 4 Lahat

Pendidikan Non Formal **:**

- Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Ikatan Akuntan Indonesia.
- Easy Speak (*Conversation Class*).
- Lami Computer (*Komputer Akuntansi*).

Pengalaman Organisasi **:**

- Relawan Anak Sumatera Selatan

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- **“Innamal A’malu Binniyat”, (Amal itu tergantung niatnya dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya).**
- **“Fabiayyi ala irobbikuma tukadziban”, (Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?) [Surah Ar-Rahman]**
- **Be a reflection of what you’d like to see in others, if you want love, give love, if you want honesty, give honesty, if you want respect, give respect. What you give is what you get.**

Kupersembahkan kepada :

- **Allah S.W.T**
- **Kedua orang tuaku**
- **Saudara-saudaraku tercinta**
- **Teman-teman angkatan 2011**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF ii

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI iii

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH iv

UCAPAN TERIMA KASIH v

KATA PENGANTAR viii

ABSTRACT ix

ABSTRAK x

DAFTAR RIWAYAT HIDUP xi

MOTO DAN PERSEMBAHAN xii

DAFTAR ISI xiii

DAFTAR TABEL xvi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Perumusan Masalah 11

1.3. Tujuan Penelitian 11

1.4. Manfaat Penelitian 12

1.5. Sistematika Skripsi 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 14

2.1. Landasan Teori 14

2.1.1. Efektivitas 16

2.1.2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 17

2.2. Penelitian Terdahulu 30

BAB III METODE PENELITIAN 31

3.1. Ruang Lingkup Penelitian 31

3.2. Desain Penelitian 31

3.3. Metode Pengumpulan Data 32

3.4. Metode Analisis Data 34

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 35

4.1. Profil Umum Objek Penelitian 35

4.1.1. Sejarah Singkat Pemerintahan 35

4.1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Setda 45

4.1.2.1. Ketentuan Umum 45

4.1.2.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pokok 46

4.1.2.3. Susunan Organisasi 47

4.1.3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) 49

4.1.3.1. Ketentuan Umum 49

4.1.3.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pokok 53

4.1.3.3. Susunan Organisasi 55

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN..... 56

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN..... 71

6.1. Kesimpulan..... 71

6.2. Saran..... 72

Daftar Pustaka 73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Sampai dengan Semester I Tahun 2013 4
Tabel 2.1 Asumsi Dasar Teori Stewardship 15
Tabel 5.1 Lingkungan Pengendalian 57
Tabel 5.2 Penilaian Resiko 62
Tabel 5.3 Kegiatan Pengendalian 65
Tabel 5.4 Informasi dan Komunikasi 67
Tabel 5.5 Pemantauan 69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi ini, pemerintah dituntut untuk melaksanakan otonomi daerah secara maksimal. Penataan ulang terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menerapkan transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, serta bertanggung jawab semakin dibutuhkan. Kemudian diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dalam perimbangan akan timbul hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Sehingga diperlukan pengelolaan keuangan negara yang cepat, tepat, dan akurat, agar mencapai sasaran yang diinginkan dengan disertai perhatian pada segi-segi efisiensi kehematannya.

Pengelolaan keuangan memang menjadi salah satu aspek mendasar yang mendukung keberhasilan sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pada konteks pemerintah daerah, reformasi pengelolaan keuangan negara dengan terbitnya Undang-Undang No. 17 tahun 2003 dan UU No.1 Tahun 2003 serta UU No. 15 tahun 2004 mengisyaratkan terjadinya perubahan yang mendasar terhadap perencanaan dan penganggaran di daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dikelola berdasarkan prestasi kerja/anggaran kinerja, yang berarti program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan APBD harus dirumuskan secara jelas dan terukur, apa *output* dan *outcomenya* (Kawedar dkk,

2008, p.100). Sasaran anggaran tercakup dalam Rencana Strategik Daerah (Renstrada) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda).

Dengan demikian, proses pengelolaan keuangan harus ditata sedemikian rupa agar dapat menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah tercapainya tujuan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan daerahnya (Lamusu, 2013:17). Selain itu, informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 antara lain: (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami.

Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) mempunyai fungsi sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) dan sebagai pembina pengelolaan keuangan Kabupaten. Terlebih lagi kantor DPPKAD juga disebut sebagai ujung tombak pengaturan keuangan daerah, tetapi sampai saat ini, pengelolaan keuangan daerah masih menunjukkan hasil yang kurang efektif karena kurang baiknya laporan keuangan pemerintah daerah (sumber : Peraturan Bupati nomor 337 tahun 2013 Tentang susdur dan prosedur pengelolaan keuangan daerah). Pengelolaan keuangan daerah yang baik memiliki kriteria dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,

transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat (Peraturan Pemerintah (PP) No 58 Tahun 2005). Menurut Tjahjanulin Domain (Hendra, 2011:51) pengelolaan keuangan daerah dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu pengelolaan penerimaan daerah dan pengelolaan pengeluaran daerah, yang bertujuan :

1. Memanfaatkan semaksimal mungkin sumber-sumber pendapatan suatu daerah.
2. Setiap anggaran daerah yang dibuat/ disusun diusahakan perbaikan-perbaikan dari anggaran daerah sebelumnya.
3. Sebagai landasan formal dari suatu kegiatan yang lebih terarah dan teratur dan memudahkan untuk melakukan pengawasan.
4. Memudahkan koordinasi dari masing-masing institusi dan dapat diarahkan sesuai dengan apa yang diprioritaskan dan dituju oleh pemerintah daerah.
5. Untuk menampung dan menganalisis serta memudahkan dalam pengambilan keputusan tentang alokasi pembiayaan terhadap proyek-proyek atau kebutuhan lain yang diajukan oleh masing-masing institusi. Berkaitan dengan pernyataan di atas, tujuan pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu faktor penting dalam mengukur secara nyata kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah

Hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang menggambarkan tingkat akuntabilitas LKPD yang secara keseluruhan dirangkum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang dikeluarkan setahun dua kali (tiap semester). Hasil pemeriksaan keuangan BPK RI atas LKPD disajikan dalam tiga kategori yaitu opini, sistem pengendalian intern (SPI), dan kepatuhan terhadap ketentuan

perundang - undangan (BPK RI, 2009). Opini audit BPK RI terdiri dari empat opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified opinion), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified opinion), Tidak Wajar (TW/Adverse opinion) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP/Disclaimer opinion). Pada saat ini, hasil penilaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah masih banyak yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian. Berdasarkan ikhtisar hasil pemeriksaan BPK Tahun 2013, Kabupaten yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berjumlah sama dengan Kabupaten yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1 Perkembangan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Sampai dengan Semester I Tahun 2013

Jenis Opini	Jumlah Pemda					
	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013	
WTP	4	25%	5	31,25%	8	50,00%
WDP	12	75%	10	62,50%	8	50,00%
TMP	-	-	1	6,25%	-	
TW	-	-	-	-	-	
Jumlah	16	100%	16	100%	16	100%

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2013

Salah satu instansi pemerintahan yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian adalah instansi pemerintahan Kabupaten Empat Lawang. Bahkan berdasarkan fenomena yang penulis temukan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Indonesia Perwakilan Sumsel menyatakan administrasi keuangan Kabupaten Empat Lawang amburadul se-Sumsel. Hal tersebut disampaikan Inspektur Inspektorat Empat Lawang, ketika ditemui diruang kerjanya. “Amburadulnya administrasi

keuangan menghambat penilaian untuk WTP. Contohnya saja, masalah gaji pegawai sering mengalami keterlambatan dan kurang koordinasinya antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) mengenai masalah pembahasan anggaran," jelasnya. Dikatakan, pihaknya juga susah berkoordinasi dengan Bappeda dan DPPKAD. Akibatnya, untuk membenahi masalah administrasi, jadi sulit. "Wajar kalau BPK menyatakan administrasi keuangan kita amburadul," katanya. Seharusnya, ujung tombak pengaturan keuangan adalah DPPKAD. "Perlu adanya sinkronisasi antar-SKPD lainnya termasuk inspektorat. Saat ini, inspektorat susah bertindak kalau tidak didukung satu sama lainnya. "Kami harapkan kerja sama antar-SKPD khususnya Bappeda dan DPPKAD," ujarnya.*(Sumber: Sumatera Ekspres)*

Selain menerbitkan laporan hasil pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang berupa opini, BPK juga menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada setiap entitas yang diperiksa. Laporan ini memaparkan tingkat kelemahan pengendalian internal yang terjadi pada suatu entitas (pemerintah daerah). Hasil evaluasi SPI oleh BPK menunjukkan kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian internal yang dapat dikelompokkan sebagai kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian internal. BPK menemukan beberapa kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas:

1. Pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat
2. Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan
3. Terlambat menyampaikan laporan

4. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai
5. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.

Sistem pengendalian yang dapat memberikan jaminan bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat berjalan secara efektif sangat dibutuhkan pada saat ini. Sebagaimana pengendalian internal menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Keberhasilan suatu sistem pengendalian ditentukan oleh seberapa jauh sesuai dengan karakteristik organisasi. Pendekatan kontijensi menunjukkan bahwa sistem pengendalian akan lebih dapat menunjang pencapaian tujuan organisasi apabila desainnya sesuai dengan kondisi lingkungan organisasi. Sistem pengendalian yang tidak sesuai dengan karakteristik organisasi dapat menimbulkan perilaku disfungsional bagi anggota organisasi (Pondevile, 2000 dalam Sawitri 2007). Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Internal.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa SPIP adalah Sistem Pengendalian Internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah tersebut lebih pada membentuk aktivitas pengendalian dan lingkungan pengendalian, sehingga ke depan pemerintah nampaknya perlu menerapkan suatu kerangka kerja manajemen resiko sehingga pengelolaan resiko menjadi efektif, dan dapat menciptakan *good governance*

(Pratama,2012:32). Berkaitan dengan hal ini, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Sedangkan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang perbendaharaan, Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyelenggarakan sistem pengendalian internal di bidang pemerintahan masing-masing. Selanjutmya, Gubernur/Bupati/Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mengatur lebih lanjut dan meyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya.

Sistem Pengendalian Internal yang dimaksud dalam PP 60 tahun 2008 merupakan suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien (*operating*), keandalan pelaporan keuangan (*financial reporting*), pengamanan asset negara (*safeguarding*) dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (*compliance*). Tujuan dari ditetapkannya PP 60 tahun 2008 ini adalah untuk mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Terkait dengan pelaksanaan penerapan PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, BPKP mempunyai tiga peran baru yaitu pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara, reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Ada 5 (lima) tahap yang dilakukan dalam proses penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yaitu:

1. Tahap pertama : *Knowing* yaitu melalui sosialisasi dan diklat
2. Tahap kedua :

   Melakukan pemetaan/*diagnostic assessment* yang dimaksudkan untuk memperoleh area perbaikan (*area of improvements*) terhadap unsur - unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang dipetakan. Berikutnya adalah melakukan perbaikan yang diperlukan terhadap unsur-unsur tersebut melalui bimbingan dan konsultasi.
3. Tahap ketiga :

   Norming yaitu setiap instansi pemerintah perlu segera membangun dan memperbaiki infrastruktur untuk penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada organisasinya.
4. Tahap keempat :

   Forming yaitu melakukan internalisasi terhadap infrastruktur yang dibangun dan diperbaiki dengan mewujudkan dalam keseharian semua yang diperlukan dalam menyelenggarakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Proses ini memerlukan waktu bagi tiap instansi pemerintah untuk dapat mencapai tujuan dari penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang dimaksudkan. Proses internalisasi ini perlu selalu dipantau dan dievaluasi secara terus menerus oleh instansi pemerintah itu sendiri untuk dapat menilai apakah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang diinginkan telah terselenggara dengan baik atau masih memerlukan perbaikan secara terus menerus.
5. Tahap kelima :

   Performing yaitu pengembangan berkelanjutan melalui *learning by doing*,karena kondisi yang dihadapi setiap instansi pemerintah selalu dinamis, dan dinamika

tersebut akan terus menimbulkan perubahan, yang akan memerlukan pengembangan yang berkelanjutan sehingga Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang dibutuhkan setiap instansi pemerintah dapat berlangsung secara baik.

Sistem Pengendalian Internal dalam Peraturan Pemerintah dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Internal melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Pengendalian internal akan melengkapi pengendalian eksternal yang sudah ditegakkan pemerintah, seperti melalui lembaga kepolisian, kejaksaan, pemberantas korupsi, pengawas keuangan maupun lembaga peradilan lainnya. Penerapan sistem pengendalian internal di lingkungan instansi pemerintah akan mendorong terciptanya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 - 2014. Hal ini dikarenakan sistem pengendalian internal mempunyai 4 tujuan yang ingin dicapai, yaitu :

1) Kegiatan yang efektif dan efisien
2) Laporan keuangan yang dapat diandalkan
3) Pengamanan aset negara
4) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (Siti dan Ely, 2010:312)

Berkaitan dengan permasalahan latar belakang, maka skripsi ini diberi judul : **"Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Empat Lawang".**

1.2 Perumusan masalah

Pokok permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Kantor DPPKAD Kabupaten Empat Lawang ?

1.3 Tujuan penelitian

Dari perumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini maka tujuan penelitiannya adalah menilai efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Kantor DPPKAD Kabupaten Empat Lawang.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Bagi Penulis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan secara mendalam dibidang audit khususnya mengenai sistem pengendalian internal pemerintah dan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

2) Bagi Universitas

   Hasil Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi perpustakaan, serta dijadikan sebagai bahan perbandingan penelitian bagi peneliti yang memiliki objek penelitian yang sama.

3) Bagi Organisasi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan yang berguna untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian internal pada instansi pemerintahan.

4) Bagi Pihak yang Berkepentingan

Sebagai bahan referensi bagi pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan.

1.5 Sistematika Skripsi

Proses akhir dari penelitian ini setelah data terkumpul dan dianalisa adalah proses penyusunan data-data dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini dijelaskan uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini dijelaskan uraian mengenai landasan teori dan penelitian sebelumnya.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini akan dibahas mengenai objek penelitian, rancangan penelitian, sumber data dan pengukuran, serta teknik analisis.

BAB IV PEMBAHASAN, bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari penelitian melalui wawancara dan teknik dokumentasi yaitu membahas tentang Efektifitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Empat Lawang.

BAB V PENUTUP, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka ditarik kesimpulan dan juga dijelaskan mengenai saran-saran membahas tentang Efektifitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Empat Lawang berdasarkan penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Lamusu,Lusiana. 2013. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada DPPKAD Kabupaten Gorontalo.*tesis*, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo (tidak dipublikasi).

Saleba,Siti Nurjannah. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.Universitas Hasanuddin, Makassar (tidak dipublikasi).

Aprilia,Rini. 2009. Peranan Audit Internal terhadap Efektivitas pengendalian Internal. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta (tidak dipublikasi).

Suprayogi,Angga. 2010. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Kantor DPPKAD Bandung).Universitas Pasundan, Bandung (tidak dipublikasi).

Tamodia,Widia. 2013. "Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern untuk Persediaan Barang Dagangan pada PT.Laris Manis Utama Cabang Manado". *Jurnal EMBA*, Vol.1 No.3.

Noholo,Sahmin. 2009. "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (Studi Kasus pada DPPKAD Gorontalo Utara)".*Jurnal EMBA*.

Ahmad,Amira. 2013. Tinjauan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit pada PT.Bank Mega Cabang Makassar.Universitas Hasanuddin, Makassar (tidak dipublikasi).

Ananda,Dwi. 2009. Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Pelayanan Bank Mandiri Cabang Medan.Universitas Sumatera Utara, Medan (tidak dipublikasi).

Kawedar,Warsito. 2009. "Opini Audit dan Sistem Pengendalian Internal (Studi Kasus di Kabupaten PWJ yang Mengalamami Opini Penurunan Audit)". *Jurnal Akuntansi dan Auditing Universitas Diponegoro*, Vol.6 No.1.

www.babel.bkkbn.go.id

www.bpkp.go.id

Ramandei, Pilipus. 2009. *"Pengaruh Karakteristik Sasaran Angggaran dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Jayapura)".* Masters thesis, Universitas Diponegoro (tidak dipublikasi).

Kabupaten Empat Lawang, Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang

Kabupaten Empat Lawang, Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2014 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang

Mulyani, Pujianik. September 2011. "Analisis Peran dan Fungsi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP/PP NO.60 Tahun 2008) dalam Meminimalisasi Tingkat Salah Saji Pencatatan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah". *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Vol.7 No.2.

Medyah Indreswari, Phd. Februari 2010, *Perapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah***,** Situs Resmi Madiknas Kosgoro.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah***,** BPKP, 2008.

Pedoman Teknis Umum Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), 2009, BPKP.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan SPIP BKPK, 2009, *Laporan Hasil Survei Kondisi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)***,** BPKP.